

**EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN LOKAL BERFERMENTASI (TUAK)
DI KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

OLEH:

**NIDAR MAWATI MENDROFA
208520060**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN LOKAL BERFERMENTASI (TUAK)
DI KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



OLEH:

**NIDAR MAWATI MENDROFA
208520060**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN


2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN LOKAL BERFERMENTASI (TUAK) DI
KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS

Nama : Nidar Mawati Mendrofa
NPM : 208520060
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :
Pembimbing


Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dekan


Dr. Drs. Indra Muda, M.AP


Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP

Tanggal Lulus : 23 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 10 Juli 2024

Nidar Mawati Mendrofa
Nidar Mawati Mendrofa
208520060

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nidar Mawati Mendrofa
NPM : 208520060
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN LOKAL BERFERMENTASI (TUAK) DI KECAMATAN
HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 10 Juni 2024
Yang menyatakan


Nidar Mawati Mendrofa

ABSTRAK

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang hendak diwujudkan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, Kedua tujuan Negara tersebut saling berkaitan dan dapat ditafsirkan mencakup pula perlindungan masyarakat dari bahaya Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera bebas Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Masalah difokuskan pada Kecamatan Huristak yang dimana perbuatan tindak kriminal yang sering dilakukan warga disana adalah masalah minuman Lokal Berfermentasi (Tuak). Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari William N Dunn, bahwa evaluasi memiliki fungsi penting yakni evaluasi memberikan informasi apakah sejauh kebijakan telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya, evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik, dan evaluasi memberikan kontribusi terhadap aplikasi dari metode analisis kebijakan termaksud didalamnya struktur dan pandangan. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas masih belum berjalan dengan baik karena masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Evaluasi Program; Pengendalian; Pengawasan; Minuman Tuak

ABSTRACT

One of the objectives of the Republic of Indonesia, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, was to protect the entire Indonesian nation and all of its territories, as well as to promote general welfare. These two objectives were interconnected and could be interpreted as including the protection of society from the dangers of Fermented Local Beverages (Tuak) to create a healthy and prosperous community free from Fermented Local Beverages (Tuak). This research aimed to describe the Evaluation of the Control and Supervision Program for Fermented Local Beverages (Tuak) in Huristak District, Padang Lawas Regency, and to identify the inhibiting and driving factors in the Evaluation of the Control and Supervision of Fermented Local Beverages (Tuak) in Huristak District, Padang Lawas Regency. The problem was focused on Huristak District, where criminal acts frequently committed by residents were related to Fermented Local Beverages (Tuak). To approach this problem, the theoretical reference from William N. Dunn was used, stating that evaluation had important functions, such as providing information on whether policies had achieved the previously set targets, contributing to the clarification and critique of the values underlying the selection of objectives and targets in public policy, and contributing to the application of policy analysis methods, including structure and perspectives. Data were collected through observation, interviews, documentation, and analyzed qualitatively. This study concluded that the Control and Supervision Program for Fermented Local Beverages (Tuak) in Huristak District, Padang Lawas Regency, had not yet run effectively due to existing implementation obstacles.

Keywords: Program Evaluation; Control; Supervision; Tuak Beverage



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nidar Mawati Mendrofa dilahirkan di Gunung Serasi Pada tanggal 15 Agustus 2002 dari ayah Atosokhi Mendrofa dan ibu Yaena Laoli. Penulis merupakan putri ke tiga dari 5 bersaudara. Awali pendidikan formal di Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 156084 Sibabangun 4 (2008-2014). Dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sibabangun (2014-2017). Penulis melanjutkan Pendidikan jenjang Pendidikan formal Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Barumun Tengah (2017-2020), dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) Di Kecamatan Huristik Kabupaten Padang Lawas”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah masalah minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) dengan judul **Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.**

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku pembimbing.. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya. Terimakasih penulis ucapkan juga kepada Para sahabat penulis Vince Trisnayanti Lase, Sri Wahyuni dan Putri Cristina Elisabet Sipayung yang telah membantu dan menemani penulis. Dan ucapan terimakasih juga kepada pemilik nama inisial A yang telah memberikan perhatian dan selalu menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

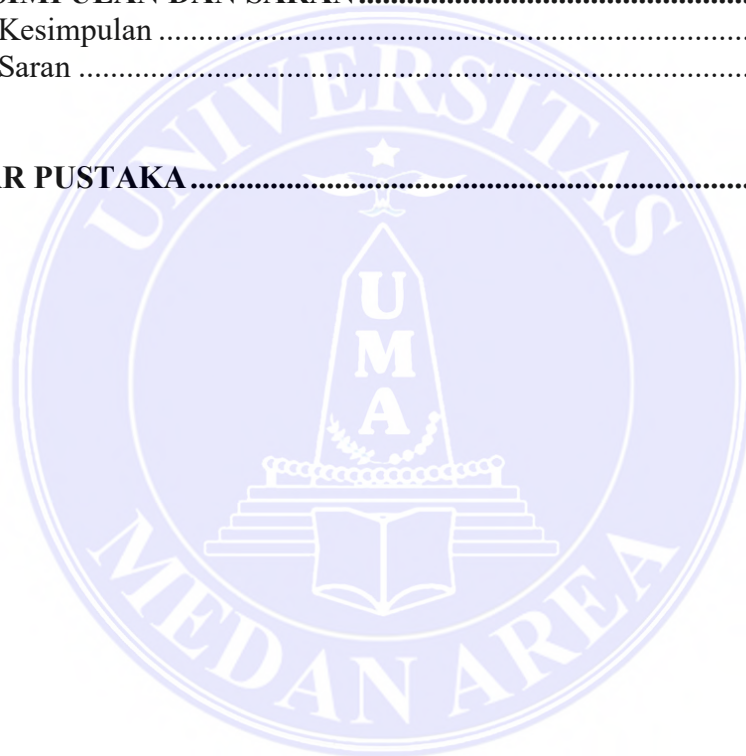
Medan, Juni 2024

Nidar Mawati Mendrofa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kebijakan Publik.....	6
2.2 Evaluasi Kebijakan	8
2.2.1 Evaluasi Menurut William N Dunn, (2017).....	9
2.2.2 Evaluasi Program	12
2.2.3 Pengertian Pengendalian	14
2.2.4 Pengertian Pengawasan	16
2.2.5 Penertiban.....	17
2.2.6. Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak)	17
2.3 Penelitian Terdahulu	19
2.4 Kerangka Pemikiran.....	23
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.2.1. Lokasi Penelitian	28
3.2.2. Waktu Penelitian	28
3.3. Informan Penelitian.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Sejarah Kecamatan Huristak	40
4.1.2 Visi Dan Misi Kecamatan Huristak (Kabupaten Padang Lawas)	41
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Huristak	44

4.2 Hasil Dan Pembahasan	45
4.2.1 Program Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	45
4.2.2 Jenis Minuman Lokal Berfermentasi yang diPerjualbelikan Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	48
4.3 Pembahasan Penelitian.....	52
4.3.1 Evaluasi Program Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	52
4.4 Faktor Penghambat	64
4.5 Faktor Pendorong.....	66
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70



DAFTAR TABEL

1	Tabulasi bahaya minuman beralkohol	2
2	Kriteria Evaluasi menurut Dunn (2017)	11
3	Pendekatan-pendekatan dalam evaluasi kebijakan menurut William N Dunn (2017)	13
4	Waktu Penelitian	28
5	Nama Desa/Kelurahan Di Kecamatan Huristak.....	36
6	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	40



DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Pemikiran.....	25
2	Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Huristak	44



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara..... 72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang hendak diwujudkan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, Kedua tujuan Negara tersebut saling berkaitan dan dapat ditafsirkan mencakup pula perlindungan masyarakat dari bahaya Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera bebas Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak). Apalagi pasal 28H undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengamanahkan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/per/11/1982 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minuman Lokal Berfermentasi atau Tuak).

Tabel 1. Tabulasi bahaya Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak)

NO	PERATURAN	TENTANG
1	Perpres No. 74 tahun 2013	Pengendalian dan Pengawasa Minuman Beralkohol
2	Permenkes 86/Men.Kes/Per/11 /1982	Larangan Peredaran Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan
3	Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Peraturan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
4	Perda Kabupaten Padang Lawas No. 07 tahun 2015	Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol

Sumber : Peneliti

Dalam hal ini titik fokus permasalahan, khususnya di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas merupakan daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, Kabupaten Padang Lawas beribukota Sibuhuan terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di sisi Timur dan Provinsi Sumatera Barat disisi Selatan. Keadaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas termasuk penduduk yang padat dan ramai, karena berada di Pusat Ibukota. Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 Kecamatan, 1 Kelurahan, dan 303 Desa dengan luas wilayah mencapai 3.892,74 km² dan jumlah penduduk sekitar 257.434 jiwa.

Salah satu perbuatan tindak kriminal yang sering dilakukan warga disana adalah masalah Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak). Minuman Lokal Berfermentasi di daerah ini sudah sangat menjamur sekali, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan anak-anak dibawah usia 21 tahun sudah

mulai mengenal akan perbuatan ini dan warung-warung Minuman Tuak yang tidak mendapat izin sudah banyak di Kabupaten Padang Lawas. Meskipun larangan, syarat, dan ketentuan pidana tentang minuman beralkohol/Minuman Tuak sudah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Hasil rampasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) oleh Satuan Polisi Pamong Kabupaten Padang Lawas, sebagai berikut:

- a. Tahun 2022, Sat Samapta Polres Padang Lawas menggagalkan peredaran minuman keras jenis tuak dari Kisaran Kabupaten Asahan yang akan diperjual belikan diseputaran Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan mobil mini bus merk Gran Max dengan Nomor Polisi 9860 DA dan dua orang diduga pelaku. (*sumber* : <https://www.sumutposonline.com>)
- b. Tahun 2022, warga desa Huta Nopan kecamatan Lubuk Barumun membawa minuman keras berjenis tuak sebanyak 11 derigen. (*sumber* : <https://www.inewstapanuli.com>)
- c. Tahun 2022, warga desa Gunung Manaon kecamatan Huristak membawa minuman beralkohol sebanyak 45 derigen. (*sumber* : <https://humas.polri.go.id>)

Dengan melihat masalah yang terjadi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas kembali menegaskan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang” Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol.” Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya tindakan Kriminal, akibat dari bahaya Minuman Tuak yang semakin menjamur dikalangan Masyarakat

Kabupaten Padang Lawas, walaupun sudah dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang” Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol”. Namun tindak Kriminal seperti Minuman Tuak masih tetap ada dan masih marak-maraknya di Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini. Berdasarkan Latar belakang diatas, peneliti tertarik dengan judul **“Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan ilmu administrasi publik, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam Mengevaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak). Serta dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membaca hasil penelitian ini. Manfaat penelitian ini berguna bagi kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas untuk Mengevaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak). Kegunaan penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan informasi, serta menjadi pembelajaran yang berharga untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam bidang Administrasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014: 114-115), kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi yang bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Kata kebijakan sebenarnya adalah terjemahan langsung dari kata “*policy*” sendiri secara etimologis berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani), yang berarti Negara-kota. Dalam bahasa Latin kata ini kemudian menjadi “*politia*” yang berarti Negara, dan dalam bahasa Inggris lama, kata tersebut menjadi *policie* yang definisinya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah.

Kebijakan publik adalah rancangan yang dilembagakan untuk memecahkan masalah yang relevan dan dunia nyata, dipandu oleh konsepsi dan diimplementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat dan ditetapkan, khususnya oleh pemerintah, dalam menanggapi masalah sosial. Tujuan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan ekstraktif dan distributif.
- b. Menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ataupun kelompok dominan dimasyarakat.

Leo Agustino, (2008: 234) mendefenisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, (2014: 126) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu :

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll, (2003: 2) Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. James E. Anderson, (2009: 20-21) Kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by actor or set of actors in dealing with a problem or matter concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu)

Sementara itu pakar kebijakan publik Thomas Dye, (2005: 44) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat dari kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang

dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

2.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Winarno (2008: 30-31), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart, (Winarno, 2008: 166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Menurut Nugroho (2014: 713), tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalah-nyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah :

- a. Tujuannya menemukan hal-hal strategi untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan target kebijakan.
- c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
- d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.

2.2.1 Evaluasi Menurut William N Dunn, (2022)

Menurut Dunn dalam Muda dan Aulia (2022: 138), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pembagian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dari manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses

kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan.

Menurut Dunn dalam Muda dan Aulia, (2022: 140-141) menyatakan bahwa di dalam evaluasi terdapat enam indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil atau akibat yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diatur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan, erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta merujuk kepada distribusi akibat dari usaha antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi kepada keadilan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, nilai kelompok-kelompok masyarakat

tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan dan pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi sebuah kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari suatu kebijakan.

6. Ketepatan, yaitu secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan merujuk kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria kelayakan biasanya bersifat terbuka, karena pendefinisian ini dimaksud untuk menjangkau keluar kriteria yang telah ada. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan table berikut :

Table 2. Kriteria Evaluasi menurut Dunn (2017)

Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, efektivitas tetap.
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, kriteria kaldor-Hicks, kriteria Rawls.

Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga Negara.
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Sumber: Muda dan Aulia, (2022). *Publik policy*

2.2.2 Evaluasi program

Dikutip dari Arikunto, (2004: 7) Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu

- a. program adalah rencana,
- b. program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama.

Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Memperkuat pendapat diatas, menurut Mulyatiningsih, (2011: 14) menjelaskan bahwa evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Untuk tujuan evaluasi program sendiri Arikunto, (2004: 13) menyebutkan bahwa ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Indikator evaluasi yang digunakan untuk menilai program adalah indikator menurut William N Dunn (2017) dalam Muda dan Aulia, 2022: 140).

Pengembangan pendekatan evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn (2017) dalam Muda dan Batubara (2019: 139) terdiri dari tiga pendekatan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

Tabel 3. Pendekatan-pendekatan dalam evaluasi kebijakan menurut William N Dunn (2017)

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk	Teknik
Evaluasi semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	<ul style="list-style-type: none"> • Eksperimental social • Akuntansi system social • Pemeriksaan social • Sintesis riset dan praktik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sajian grafik • Tampilan tabel • Angka indeks • Analisis seri waktu terinterupsi • Analisis seri terkontrol • Analisis diskontinyu-regresi.
Evaluasi formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid	Tujuan dan sasaran mengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi perkembangan • Evaluasi eksperimental • Evaluasi proses retrospektif (expost) • Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan sasaran • Klarifikasi nilai • Kritik nilai • Pemetaan hambatan • Analisis dampak silang • Discounting

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk	Teknik
Evaluasi keputusan teoritis	megenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	hasil retrospektif	
	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal maupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi • Analisis utilitas multi atribut, yaitu serangkaian prosedur yang diciptakan untuk mengambil dari para pelaku kebijakan yang banyak memiliki pandangan subjektif tentang probabilitas terjadinya sesuatu atau nilai dari hasil kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brainstorming • Analisis argumentasi • Delphi kebijakan • Analisis survey pemakaian, yaitu serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi dari calon pemakai dan pelaku-pelakukebijakan lainnya mengenai evaluabilitas suatu kebijakan atau program.

Sumber: Muda dan Batubara (2019). *public policy*

2.2.3 Pengertian Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian (*control*) adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan mengarahkan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan

penyimpangan dari standard dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik.

Beberapa para ahli mengemukakan pengertian pengendalian diantaranya yaitu :

1. Fayol, (2007: 60) merumuskan salah satu definisi pertama control karena berkaitan dengan manajemen : pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Adalah penting untuk mengetahui kesalahan agar mereka dapat diperbaiki dan dicegah dari berulang.
2. Strong, (2001: 241) "*controlling is the process of regulating the various factor in an enterprise according to the requirement of its plans.*" Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai factor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.
3. Koontz, (2016: 89) mengemukakan pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggarakan.

Menurut Robbins dan Coulter, (2003: 512) pengendalian (*controlling*) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi

dapat untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Untuk melaksanakan kegiatan pengendalian secara efektif dan efisien, perusahaan memerlukan system pengendalian. Menurut Lorangedkk, (1986) sistem pengendalian adalah seperangkat instrument yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja dan system pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini ada dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.2.4 Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.”

Menurut Sondang P. Siagian,(2005: 135) “pengawasan adalah proses pengamatan dari pada peleksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Sarwoto, “pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”. Dan menurut Sujamto, “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan

menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

2.2.5 Penertiban

Penertiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan, hal yang menertibkan, proses, pembuatan atau cara menjadi tertib. Penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut Rahardjo, (2006) secara etimologis pertiban berasal dari kata tertib yaitu teratur, rapi dan apik, ketertiban dan kekacauan berada dalam suatu asas yang sama yaitu asas proses social yang bersambung dan tidak berseberangan, keduanya berada dalam satu asas kehidupan.

Penertiban muncul karena adanya kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, begitu pula seterusnya. Penertiban adalah tindakan dalam rangka menimbulkan ketaatan dari warga masyarakat supaya tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengertian tersebut disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja.

2.2.6 Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak)

Tuak merupakan suatu jenis cairan/minuman yang mengandung alkohol yang terbuat dari nira kelapa atau jenis pohon penghasil nira lainnya seperti siwalan, lontar dan aren yang disadap dan kemudian hasil sadapannya didiamkan selama beberapa hari. Pemberian tuak pada mencit dengan dosis yang lebih tinggi

atau berlebihan dan waktu yang cenderung lebih lama dapat mempengaruhi atau merusak fungsi organ vital yang terdapat dalam tubuh, contohnya mempengaruhi organ hati, ginjal, otak, jantung dan organ vital lainnya dalam hal ini organ reproduksi.

Disamping itu, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan ketagihan, mabuk dan tidak mampu mengendalikan diri jika mengonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Nira aren yang merupakan bahan dasar pembuatan tuak mengandung alkohol dengan kadar 4%. Alkohol telah menjadi masalah yang umum di seluruh dunia. Di Inggris sekitar 87% penduduk mengonsumsi alkohol pada beberapa tahun terakhir (National Collaborating Centre for Mental Health, 2020). Dilaporkan bahwa terdapat kecenderungan konsumsi alkohol pada anak muda di Indonesia 4,3% siswa dan 0,8% siswi paling tidak pernah mengonsumsi alkohol dalam sebulan terakhir (World Health Organization, 2020).

Alkohol secara kimawi merupakan zat hasil fermentasi dan memiliki jalur metabolisme tersendiri dalam tubuh. Alkohol mempengaruhi beberapa sistem organ ataupun organ dalam tubuh. Sistem organ atau organ yang dipengaruhi antara lain hati, sistem saraf pusat, sistem kardiovaskular, sistem kekebalan tubuh, sistem darah, sistem hormonal, sistem pencernaan, pankreas, ginjal dan keseimbangan elektrolit. Alkohol juga dapat mempengaruhi penyerapan zat gizi, perkembangan janin serta mempengaruhi resiko untuk beberapa jenis kanker. Alkohol merupakan hasil produksi dari fermentasi, dimana mikroorganisme seperti ragi memecah gula-gula sederhana (seperti gula, atau maltosa), menjadi alkohol, karbondioksida, dan air tanpa bantuan oksigen.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan terdahulu bisa menjadi sebuah acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang serupa sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan atau bisa memunculkan teori baru jika penelitian terdahulu yang dilakukan tidak sesuai dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti, teori yang digunakan akan terus mengalami pembaharuan dan nantinya akan menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang serupa. Sehingga menggunakan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai referensi untuk menjadi pedoman dari kajian penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dan jurnal terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

1. Hasil Penelitian dari skripsi Lanna Rosalia, (2020) dengan judul pelaksanaan peraturan daerah Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas di tinjau menurut Fiqh Siyash. Penelitian yang dilakukan oleh Lanna Rosalia bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol Di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak kecamatan barumon dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan data sekunder yang didapat dari

buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dilapangannya masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah terus menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol dan pemerintah masih terus berusaha dalam memberantas dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran tersebut. Akan tetapi sanksi hukuman yang di berikan bagi pelanggar Perda tidak membuat jera bagi si pelaku.

2. Hasil penelitian oleh Rachmansyah Saputra, (2019) dengan judul implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi, faktor penghambat dan strategi yang tepat dalam kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmansyah, melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Muara Enim belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja antara lain: belum terlaksananya dengan baik Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, belum berkualitasnya sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, serta komunikasi antar lembaga terkait yang belum terlaksana dengan baik.

3. penelitian dari Enggar Paskhalis Lahu dan Marthin Thomas Mumbunan, (2022) dengan judul Evaluasi Kebijakan Minuman Beralkohol : menekan Tingkat Konsumsi Minuman Alkohol Ilegal Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan minol eksisting sekaligus merancang solusi alternatif kebijakan pengendalian minuman beralkohol dalam Upaya mengurangi tingkat konsumsi minuman beralkohol ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode desk study. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pelarangan penjualan minuman beralkohol di gerai kecil hanya untuk golongan B dan C disertai kenaikan cukai kebijakan ini diambil karena memiliki skor lebih tinggi dari kriteria pemilihan lainnya.
4. Hasil penelitian dari Charoles Luanga Saka, (2020) dengan judul “Evaluasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kabupaten Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sikka belum berjalan maksimal.
5. Penelitian dari Alexander Henri Homer, (2022) dengan judul ”Evaluasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Keerom provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman

beralkohol di Kabupaten Keerom serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam kebijakan ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu kebijakan pengendalian dan penguasaan minuman beralkohol di kabupaten Keerom ini belum berjalan dengan baik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Pada kebijakan ini terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkannya tidak berjalan dengan baik, seperti belum adanya PPNS, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebijakan tersebut, dan tidak adanya keterlibatan tokoh adat dalam pembuatan kebijakan

Kesimpulan perbedaan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh kelima penelitian terdahulu di atas terlihat Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) Di kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian terdahulu yakni menggunakan teori dan pendapat menurut William N. Dunn, (Muda, Aulia, 2022: 138) bahwa evaluasi memiliki fungsi penting yakni evaluasi memberikan informasi apakah sejauh kebijakan telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya, evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik, dan evaluasi memberikan kontribusi terhadap aplikasi dari metode analisis kebijakan termaksud didalamnya struktur dan pandangan. Ada beberapa indikator

untuk mengevaluasi kebijakan yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

2.4 Kerangka Pemikiran

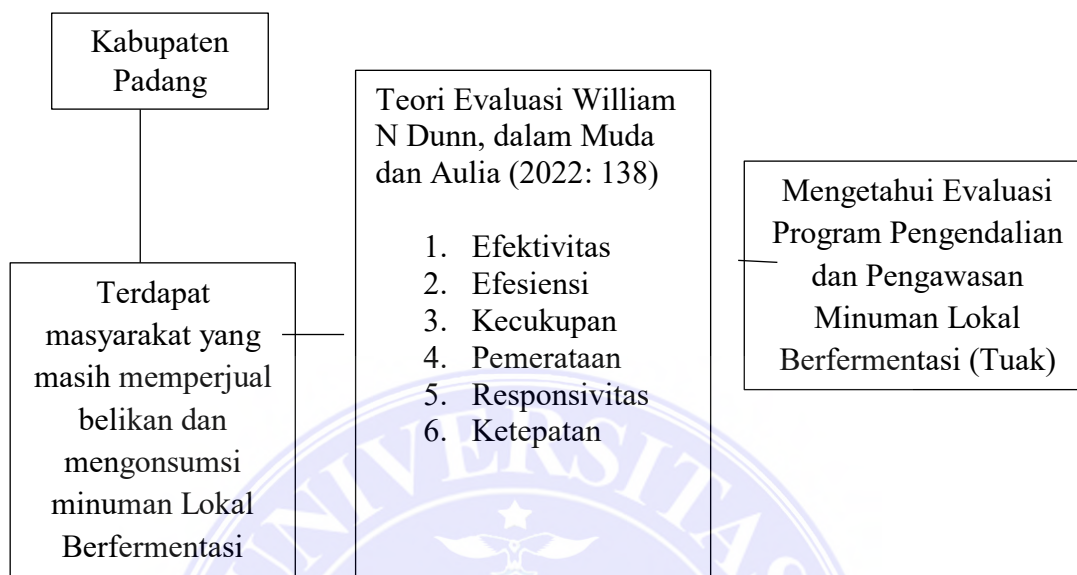
Kerangka pemikiran adalah dasar yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah, kerangka pemikiran merupakan rancangan atau gambaran dari fakta-fakta, teori, kajian pustaka, serta observasi yang telah dilakukan yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, (2015) kerangka berfikir dapat di deskripsikan sebagai model konseptual yaitu mengaitkan antara teori yang digunakan dengan beberapa faktor penyebab yang telah diidentifikasi menjadi suatu permasalahan. Dari penjelasan mengenai kerangka pemikiran maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berfikir adalah pola pikir mengenai hubungan antara variable atau permasalahan terhadap suatu peristiwa yang menjadi hipotesis dalam penelitian.

Pada lokasi penelitian yang telah ditentukan di kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, Untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, maka peneliti menggunakan teori William N Dunn untuk melihat seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Menurut Dunn, (2017) dalam Muda dan Aulia, (2022), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pembagian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*).

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dan merata baik materiil maupun spiritual serta masyarakat yang bercahaya. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan Minuman Tuak serta peredarannya. Penyalahgunaan dan peredaran Minuman Tuak yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Bentuk Pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terhadap peredaran dan penjualan minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) adalah dengan menerbitkan SIUP dan SIUPMK. Dalam pelaksanaannya SIUP dan SIUPMK diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang diedarkan atau dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan. Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Padang Lawas Nomor 07 tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirumuskan dalam bagan berikut:



Gambar.1: Kerangka Pemikiran
Sumber : Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, naratif, dan cenderung menggunakan analisis terhadap sesuatu yang akan diteliti. Metode kualitatif fokusnya terhadap penemuan yang mendalam, maka hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif berupa kajian terhadap suatu fenomena yang lebih menyeluruh.

Fadli, (2021) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Hennink, Hutter & Bailey, (2020); Sarmanu, (2017) Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat *post-positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena tujuan utama dalam penelitian

kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru.

Menurut Bogdan dan Taylor, (2017: 4) Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tanpa izin di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Pendekatan kualitatif tergolong dalam *naturalistic inquiry*, yaitu pendekatan yang memerlukan manusia sebagai instrumen karena penelitiannya yang sarat oleh muatan naturalistik, seperti dikemukakan bahwa „*Naturalistic inquiry is always carried out, logically enough, in a natural setting, since context is so heavily implicated in meaning Instrumen*“ penelitian ialah manusia itu sendiri, yang berarti peneliti yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang akan dihadapi dalam kegiatan penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tanpa izin di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Melalui penelitian kualitatif, maka peneliti akan memperoleh data yang ada dilapangan untuk dianalisis lebih mendalam secara rinci dan detail. Hasil yang

diperoleh dari penelitian kualitatif nantinya memungkinkan untuk dapat menggantikan teori lama karena berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan atau memungkinkan dari hasil penelitian kualitatif dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai landasan dalam penelitian.

3.2. Lokasi dan Waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

3.2.2. Waktu Penelitian

Table 4. waktu penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agts 2024
1	Penyusunan Proposal	■										
2	Seminar Proposal		■									
3	Perbaikan Proposal			■								
4	Pelaksanaan Penelitian				■	■	■	■	■			
5	Seminar Hasil									■		
6	Revisi Skripsi										■	
7	Siding Meja hijau											■

Sumber: peneliti

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu maupun kelompok yang bisa memberikan informasi, dimana yang diperoleh dari informan penelitian tersebut bisa berupa orang, benda, maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi terhadap dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu peristiwa yang terjadi kepada peneliti secara mendalam. Informan penelitian dengan teknik purposive sampling, pemilihan informan penelitian didasarkan kepada peninjauan bahwa informan peneliti dapat memberikan informasi yang relevan dengan detail secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik yang dilakukan dalam pemilihan informan dalam kegiatan ini adalah perangkat daerah di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang menangani langsung suatu kejadian yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Kunci

Informan Kunci adalah informan yang berwibawa dan memiliki pengaruh sehingga dipercaya dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian. Penelitian akan melakukan wawancara kepada informan terkait dan mencatat hasil wawancara. Informan kunci merupakan orang yang paling mengetahui dari segala aspek yang ingin dikaji oleh peneliti, sehingga informan kunci diperlukan sebagai tempat untuk bertanya dan mendapatkan gambaran dari keseluruhan tentang masalah yang sedang diamati. Pada

penelitian ini Informan Kuncinya adalah Camat dan staff Kecamatan Huristak. (Bapak Asrian Sregar)

2. Informan Utama

Informan Utama adalah individu maupun kelompok yang terlibat langsung dalam interaksi social terkait objek yang sedang diteliti. Informan Utama dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang diteliti dari secara teknik maupun informasi detail permasalahan. Pada penelitian ini Informan Utamanya adalah pemilik warung yang menjual minuman beralkohol. (Ibu Desi dan Ibu Br Torus)

3. Informan Tambahan

Informan Tambahan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder terkait masalah penelitian, informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi pelengkap untuk ditambahkan didalam analisis penelitian. Informan tambahan dapat memberikan informasi yang terkadang tidak didapatkan oleh informan kunci dan informan utama. Pada penelitian ini Informan Tambahannya adalah masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan warung minuman beralkohol. (Bapak Laia dan Ibu Ningsih)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data dari sumber penelitian. Menurut Kristanto (2018: 60),

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, karena didalam teknik pengumpulan data nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian. Didalam sebuah penelitian pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki integritas tinggi, dan sebaliknya. Maka dari itu, teknik pengumpulan data tidak boleh keliru dan harus dilakukan dengan cermat.

Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif ada 3 macam, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh bisa berupa tulisan, foto, gambar, maupun dokumen penting dan resmi, namun bukan berupa angka-angka. Untuk meningkatkan kepercayaan kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bisa menggunakan teknik pengumpulan data tambahan dengan menggunakan teknik triangulasi. Semiawan, (2010: 17) Penggunaan teknik triangulasi ialah untuk memperkuat data yang diperoleh dan data yang valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Kristanto, (2018) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dari lapangan, observasi dilakukan dengan proses pengamatan terlebih dahulu kemudian mencatat data yang diperoleh secara logis, sistematis, objektif, dan rasional terhadap fenomena yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Teknik observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan

menggunakan panca inderanya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan dengan melakukan pengamat sendiri, kemudian menyimpulkan dari apa yang amati itu

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Menurut Yusuf, (2014: 372) Wawancara adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari penelitian, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan reponden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data melalui serangkaian pertanyaan dengan pihak kabupaten padang lawas.

3. Dokumentasi

Yusuf, (2014: 384) Teknik dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada didapatkan dari informan-informan terkait permasalahan yang diteliti. Teknik dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dan menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang yang ada didalam suatu peristiwa, atau kejadian pada situasi sosial yang sangat berguna dalam melakukan penelitian kualitatif.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi guna mempermudah dalam menganalisis data yang diperoleh agar dapat tersebut mudah dipahami. Teknik analisi data diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi didalam penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah pengumpulan data berlangsung atau setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Maka Menurut Noeng Muhadjir, (1998) analisis data dilakukan pada saat wawancara, saat peneliti sudah mulai melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan informan. Ketika jawaban yang diberikan informan belum menjawab tujuan penelitian dan kurang kongkrit, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap data yang diperoleh menjadi kredibel. Tujuan teknik analisis data adalah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang didapatkan dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berlanjut hingga tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menggunakan model *Miles, Huberman* dalam Saldana, (2014: 12-14). Terdapat tiga alur analisis data, secara detailnya sebagai berikut:

1. Reduksi

Reduksi merupakan tahapan yang digunakan dalam teknik analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan memiliki jumlah yang banyak sehingga perlu digabungkan menjadi satu bagian dan merangkum pokok permasalahan secara rinci hasil yang ditemukan lapangan. Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting serta dicari dan tema yang pokok sekaligus penyerderhanaan data yang muncul dari hasil lapangan.

2. Penyajian

Penyajian dalam teknik analisis data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, menghubungkan antar kategori, maupun sejenisnya. Tahap penyajian ini peneliti melakukan klasifikasi data atau pengelompokan data ke dalam penggolongan tertentu setelah data didapat di lapangan dan setelah diberi tanda khusus terhadap data tersebut. Oleh karena itu, penggolongan data juga mempermudah peneliti untuk menentukan data yang paling penting dan tidak penting pada tahap reduksi, sehingga peneliti dapat mengkategorikan dari data yang telah dikumpulkan.

3. Kesimpulan

Langkah terakhir pada tahapan analisis data adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melalui dua tahap sebelumnya sehingga peneliti dapat mencari dan menemukan

permasalahan yang terjadi dilapangan. Pada tahap kesimpulan ini peneliti mencatat keteraturan, pola-pola mengenai penjelasan, alur kausalitas, proposisi dan konfigurasi. Selama di lapangan ketika melakukan penelitian berlangsung peneliti melakukan tahap kesimpulan secara terus-menerus. Kemudian data tersebut menjadi data yang valid dan akurat yang dituliskan pada kesimpulan. Langkah ini dilakukan juga sampai berakhirnya peneliti di lapangan dan mendapatkan data sesuai dengan tujuan dari pada penelitian yang dilakukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Program Pengendalian dan Pengawasan Minuman Lokal Berfermentasi (Tuak) di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, dapat disimpulkan bahwa program ini masih menghadapi beberapa hambatan dalam mencapai tujuannya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan dana, kurangnya kerjasama dari pemilik usaha atau masyarakat setempat, tingginya tingkat korupsi atau kolusi, tantangan dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku usaha minuman tuak, serta keterbatasan peraturan atau undang-undang yang mendukung penindakan terhadap pelanggar.
2. Faktor penghambat dan pendorong untuk melakukan Evaluasi Program ini antara lain kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya kerjasama dari pemilik usaha atau masyarakat setempat, tingginya tingkat konsumsi minuman Tuak di wilayah tersebut, potensi dampak negatif dari konsumsi minuman Tuak, adanya laporan atau peningkatan kasus terkait dengan penyalahgunaan minuman tuak, kehadiran atau operasi bisnis ilegal yang memproduksi atau menjual minuman tuak di wilayah tersebut, dorongan dari pemerintah pusat atau daerah, ketersediaan

sumber daya dan dukungan, serta kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak terkait.

5.2 Saran

1. Peningkatan Sumber Daya

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi sumber daya manusia dan dana untuk mendukung program ini agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.

2. Peningkatan Kerjasama Masyarakat

Melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat, agama, dan pemuka adat dalam sosialisasi dan penegakan hukum dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

3. Penguatan Penegakan Hukum

Mengurangi tingkat korupsi dan kolusi dengan mengawasi aparat yang bertugas serta memberikan sanksi tegas kepada pelanggar.

4. Edukasi yang Lebih Intensif

Melakukan edukasi secara lebih intensif dan merata, termasuk di daerah terpencil, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman tuak.

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Agustino, Leo (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bogdan dan Taylor (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Muda, Indra, Aulia, Rezki (2022). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada
- Muda, Indra, Batubara, Beby. M (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada
- Mulyatiningsih, E (2011). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta
- Nugroho, Riant (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant (2014). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Siagian, P Sondang (2005). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Cetakan Pertama edisi revisi. Bumi Aksara
- Sinaga, Rudi salam (2016). *Politik Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Daerah. Jurnal Praxis dan Policy, Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2016.*
- Sugiyono. 2014 . *metode penelitian manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT buku kita
- Winarno, Budi. 2012. *kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Yogyakarta. media persido
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Jakarta: Kencana.

b. Jurnal

- Aisyah¹, Hassyimuddin², Samsidar³, (2018). Uji Alkohol Pada Fermentasi Tuak. *Jurnal Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri*

- Fadli, M. R (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah mata Kuliah Umum, Vol. 21 No.1 Tahun 2021*.
- Homer, AH (2022). Evaluasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Keerom provinsi Papua. *Jurnal Asdaf Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Program Studi Politik Indonesia Terapan*. NPP: 30.1609
- Jamil, Bahrum & Simamora, Beltahmamero (2023).Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) 5 (2), 174-181, 2023*.
- Lahu, L. P, Mumbunan, M. T (2022). Evaluasi Kebijakan Minuman Alkohol Ilegal Di Indonesia. <https://jurnal-tripanji.id>
- Masnil¹, Nur Fitrah², Yusuf Daud³, (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberantasan Minuman Keras (Dalam Penegakan Perda Nomor 21 Tahun 2012. *jurnal Implementation, Regional Regulations, Liquor*
- Respatiadi, H, Tandra, S (2018). Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan Di Bandung, Jawa Barat. *Jurnal UN-WHO (2014), International Alliance For Responsible Drinkers (IARD), dan Center For Indonesia Policy Studies (2016)*.
- Saka, C. L (2020). Evaluasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kabupaten Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* ISSN : 2301-6965
- Saputra, R (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal kebijakan pemerintahan. Vol. 2, No.2, Desember 2019 : 111-126*.
- Wijaya, G. I. A (2021). Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Media Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No.6 Tahun 2021, hlm. 424-434*.

c. Skripsi

- Hasibuan, L. R (2020). Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Figh Siyasa. *Skripsi UIN SUSKA RIAU*

d. Peraturan

Presiden Republik Indonesia *Peraturan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol*

Perda Kabupaten Padang Lawas *Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol*

Menteri Kesehatan *Nomor 86/Men.Kes/per/II/1982 tentang larangan peredaran produksi dan mengimpor minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan*

menteri perdagangan *nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri perdagangan nomor 20/M/-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.*

e. Internet

Sumutposonline.com (2022, September, 03). PADANG LAWAS: Sat Samapta Polres Padang Lawas menggagalkan peredaran minuman keras jenis tuak dari Kisaran Kabupaten Asahan yang akan diperjual belikan disepertaran Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. <https://www.sumutposonline.com>

iNewsTapanuli (2022, oktober, 12).PADANG LAWAS: warga desa Huta Nopan kecamatan Lubuk Barumun membawa minuman keras berjenis tuak sebanyak 11 derigen. <https://www.inewstapanuli.com>

MitaNews. (2022, September, 03) warga desa Gunung Manaon kecamatan Huristak membawa minuman beralkohol sebanyak 45 derigen. <https://humas.polri.go.id>

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan Camat dan staf kantor Camat Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas



Gambar 3: Informan kunci Bapak Asrian Siregar
Sumber : peneliti

Dokumentasi wawancara dengan penjual minuman beralkohol jenis Tuak mentah Bu Br Torus



Dokumentasi wawancara dengan penjual minuman beralkohol jenis Tuak suling Bu Desi



Gambar : Infoman utama penjual minuman beralkohol
Sumber : peneliti

Dokumentasi wawancara dengan masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan warung minuman beralkohol



Gambar 6: informan tambahan Pak Laia dan Bu Ningsih
Sumber : peneliti

Dokumentasi gambar pengonsumsi minuman beralkohol



**Gambar 7 : konsumsi minuman beralkohol
Sumber : peneliti**